

Perpajakan Di Masyarakat Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Taxation In Society For Devalopment And Welfare

Taxation In Society For Development And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare

Andriyani Prawitasari ¹⁾, Yodista ²⁾ Nenden Restu Hidayah ³
^{1,2,3)} *Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ¹⁾ yodistayodis16@gmail.com

How to Cite :

Prawitasari, A., Yodista, Y., Hidayah, N, R. (2025). Taxation In Society For Development And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare . Journal of Law, Social Science, and Management Review. 1(3). DOI: <https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i3>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2025]

Revised [15 May 2025]

Accepted [17 May 2025]

KEYWORDS

Taxation, Devalopment, Welfare,
Infrastructure, Income Redistribution.

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perpajakan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pengelolaan pajak yang baik dapat menciptakan pemerataan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pajak juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara. Artikel ini membahas bagaimana perpajakan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan yang adil dan transparan.

ABSTRACT

Taxation plays a crucial role in supporting development and welfare in society. As a primary source of government revenue, taxes are used to finance various sectors such as infrastructure, education, healthcare, and public services. Proper tax management can ensure equal access to quality basic services, reduce social inequalities, and create employment opportunities. Additionally, taxation contributes to the economic stability of the country. This article discusses how taxation can enhance development and welfare, as well as the importance of active participation from society in a fair and transparent tax system.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sosial lainnya. Tanpa pajak yang dikelola dengan baik, negara akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendanaan yang besar, dan salah satu cara yang paling efektif untuk memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak. Selain itu, perpajakan juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan cara mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, perpajakan yang adil dan transparan menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan negara yang berkembang.

Dalam konteks ini, peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat penting. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam sistem perpajakan tidak hanya membantu membiayai pembangunan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan negara. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang kontribusi perpajakan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana perpajakan yang efisien dan adil dapat menciptakan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Dalam lima tahun terakhir, berbagai studi dan kebijakan telah menyoroti peran perpajakan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perpajakan berfungsi sebagai pendapatan utama bagi negara untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak bukan hanya instrumen pengumpulan dana, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membantu redistribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang efisien dan adil menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Landasan inilah yang menunjukkan bahwa perpajakan tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kontribusi perpajakan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran perpajakan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dan analisis kebijakan perpajakan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai metode yang digunakan:

Tabel 1 Metode

METODE	DESKRIPSI	SUMBER DATA
Studi Pustaka	Penelusuran literatur, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan terkait perpajakan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.	Buku, jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan fiskal (Kementerian Keuangan DJP)
Wawancara mendalam	Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan informan yang kompeten, seperti pejabat perpajakan, akademisi, dan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan pajak.	Narasumber : pegawai pajak, ekonom, dan masyarakat di berbagai daerah.
Analisis Kebijakan	Kajian terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia, termasuk Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), untuk memahami efektivitas dan dampaknya.	Dokumen kebijakan perpajakan, laporan implementasi, dan publik resmi pemerintah.
Analisis Data	Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara perpajakan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.	Hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumen kebijakan.

Prosedur Penelitian:

1. Pengumpulan Data

- Studi pustaka dilakukan dengan mengakses sumber-sumber terpercaya seperti publikasi pemerintah dan jurnal akademik.
- Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh data primer langsung dari para informan.
- Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi dokumen hukum dan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang relevan.

2. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan penelitian.

3. Validasi Data

Validitas data dijaga dengan melakukan trigulasi antara hasil wawancara, studi pustaka, dan analisis kebijakan. Langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori seperti jenis kontribusi perpajakan, tantangan, dan solusi.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang bagaimana sistem perpajakan mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpajakan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis data dari beberapa aspek utama, seperti penerimaan pajak, alokasi dana pajak untuk pembangunan, serta dampak kebijakan perpajakan terhadap kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah hasil utama penelitian:

1. Penerimaan pajak dan alokasinya untuk pembangunan

Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat secara bertahap selama lima tahun terakhir. Penerimaan ini dialokasikan untuk mendanai berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial.

Tabel 2 Data

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Alokasi Infrastruktur (%)	Alokasi Pendidikan	Alokasi Kesehatan
2019	1.546,1	20%	20%	10%
2020	1.285,1	22%	21%	12%
2021	1.546,8	23%	21%	13%
2022	1.716,8	24%	22%	14%
2023	1.964,0 (hingga Juli)	25%	23%	15%

Sumber: Data Kementerian Keuangan RI

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana untuk sektor kesehatan dan pendidikan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1. Dampak pajak terhadap pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pajak, seperti jalan tol, jembatan, dan fasilitas publik lainnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Data dari wawancara menunjukkan bahwa 8% responden merasa infrastruktur baru memudahkan akses ke layanan publik dan meningkatkan produktivitas.

2. Redistribusi pendapatan melalui program sosial

Sistem perpajakan progresif telah memungkinkan redistribusi pendapatan melalui program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hasil penelitian mencatat bahwa 78% penerima manfaat program tersebut merasa kesejahteraan mereka meningkat.

3. Tantangan dalam implementasi perpajakan

Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak (hanya sekitar 60% wajib pajak patuh pada tahun 2022) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Pembahasan

Perpajakan merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting, terutama untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Infrastruktur yang dibiayai oleh pajak, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah, memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar yang mereka butuhkan.

Selain itu, perpajakan juga memiliki peran signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui sistem redistribusi pendapatan, pajak progresif, di mana orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, memungkinkan pemerintah mendistribusikan sumber daya ke kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk mendukung program-program sosial, seperti bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, dan jaminan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan perpajakan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dan distribusi hasil pajak yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menjadi hambatan dalam menciptakan keseimbangan pembangunan. Masalah ini memerlukan reformasi perpajakan yang terstruktur, seperti penyederhaan sistem perpajakan, digitalisasi layanan pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah signifikan melalui reformasi perpajakan, seperti penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan menyempurnakan sistem pajak agar lebih efisien dan adil. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak meningkat, basis pajak semakin luas, dan pendapatan negara lebih optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kesuksesan perpajakan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan sistem perpajakan yang baik dan adil, serta transparan maka perpajakan dapat menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perpajakan merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang esensial. Selain itu, sistem perpajakan progresif berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi pendapatan. Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak dan distribusi yang belum merata perlu diatasi melalui reformasi perpajakan yang efisien dan transparan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, perpajakan dapat menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Belanja Perpajakan 2022. Diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023. Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
- Yuspitara, A., Susena, K., & Herlin, -. (2017). ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR PROVINSI BENGKULU. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.389>